



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat Rahmat dan Hidayahnya kami dapat menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja Perubahan-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan pada Tahun 2025 dalam rangka pencapaian indikator RPJMD 2021-2026 yang disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan khususnya bidang kesehatan.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Sumatera Barat "Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat ". Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.

Padang, Juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat
dr. Lila Yanwar, MARS.
NIP. 19720330 200212 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan di daerah, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 103 ayat (1) menyatakan : Rancangan awal RKPD Provinsi disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi dan mengacu kepada RPJM Nasional. Selanjutnya pada pasal 287 ayat (1) menyatakan, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Dan lebih dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Disamping itu penyusunan ini juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan guna mencapai visi 2025 yakni Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera

dan Bermartabat yakni : 1) Pengamalan Agama dan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dalam Kehidupan Masyarakat, 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, 5) Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan, 6) Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan dan Iklim Investasi, 7) Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Wisata Budaya, 8) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, 9) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat, dan 10) Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mengintegrasikan program- program pemerintah pusat dan Kab/Kota dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Sustainable Development Goals (SDGs) serta mempertimbangkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ada sebelumnya. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Renja Perubahan dimulai dengan penetapan Tim Penyusunan Renja, Pelaksanaan Orientasi Renja Perubahan yang dilaksanakan secara internal Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melalui pembahasan per program, Agenda Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan jadwal kalender perencanaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengolahan Data dan Informasi, Analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Telaahan terhadap rancangan awal RKPD, Perumusan tujuan dan sasaran, Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan Perumusan kegiatan prioritas.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- 10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 11 Pergub Nomor 33 Tahun 2022 tentang uraian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi.
- 12 Surat Edaran Gubernur Nomor 050/78/IV/P2PCD/Bappeda - 2025 tentang Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan sebagai panduan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta untuk efektifitas proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan kesehatan guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai Acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEMESTER I

- 2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II Tahun 2025

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2025

Dalam bab ini akan diuraikan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Perubahan Tahunan 2025.

Selain itu dibahas pula akuntabilitas keuangan yang diterima Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat keadaan Triwulan II tahun 2025 Dalam rancangan awal Renja Perubahan Dinas Kesehatan terdapat 10 indikator kinerja utama untuk tahun 2021-2026 yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Renstra 2021-2026.

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk urusan wajib sebesar Rp.180.335.062.090 dengan Pendapatan Asli Daerah Rp. 16.048.537.341,- yang terdiri dari 5 Program dengan 17 Kegiatan 73 Sub kegiatan dengan rincian sbb :

Tabel 2.1.

Realisasi Program Kegiatan Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Target Dalam Dok. Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
					217.300.900.245		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					96.702.159.338,94		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					146.875.000	25.352.000	17,26%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen			140.779.000	25.352.000	18,01%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan			6.096.000	0	
Administrasi keuangan perangkat daerah					68.975.658.795	33.755.445.796	48,93%
3	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	553 Orang / bulan			68.531.678.795	33.507.525.151	48,89%
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	16 dokumen			442.960.000	247.240.000	55,82

5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	14 laporan			1.020.000	680.000	66,67%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					203.297.000	77.423.442	38,06%
6	Pengamanan barang milik daerah SKPD	5 dokumen			194.900.000	77.423.442	39,72%
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan			442.000	0	
8	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	5 laporan			7.955.000	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.651.525.174	179.426.689	10,86%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket			7.530.500	0	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (UPTD.BKOM)	1 paket			1.250.000	0	
11	Penyediaan bahan logistik kantor	7 paket			124.106.971	6.360.000	5,12%

No.	Program / Kegiatan	Target Dalam Dok. Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
12	Penyediaan bahan logistik kantor (UPTD.BKOM)	1 paket			1.225.000	0	
13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 paket			126.897.700	0	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	2 Dokumen			14.280.000	500.000	3,50%
15	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan			1.234.987.003	93.093.709	7,54%
16	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (UPTD.BKOM)	12 laporan			14.758.000	12.143.380	82,28%
17	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (UPTD BKIM)	12 laporan			42.990.000	21.007.100	48,87%
18	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (UPTD RS Paru)	12 laporan			25.000.000	19.352.500	77,41%

No.	Program / Kegiatan	Target Dalam Dok. Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (UPTD BKOM)	1 Dokumen			58.500.000	26.970.000	46,10%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					240.000	0	
20	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	29 Unit			240.000	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.598.061.337,94	1.276.754.544	35,45%
21	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 laporan			660.552.494	325.104.991	49,25%
22	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD BKOM)	1 laporan			288.479.945	138.452.586	47,99%
23	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD	3 laporan			43.801.600	37.451.522	85,50%

	RS Paru)						
24	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan			1.861.859.056	583.479.926	31,34%
25	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPTD BKOM)	1 laporan			743.368.242,94	191.265.519	25,73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					558.328.000	49.888.050	8,93%
26	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	14 unit			183.200.000	34.648.870	18,91%
27	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPTD RS Paru)	3 unit			21.150.000	3.516.900	16,63%
28	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPTD BKOM)	2 unit			17.450.000	0	

29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143 unit			34.920.000	1.850.000	5,30%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit			49.868.000	0	
31	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD LABKES)	1 unit			50.000.000	0	
32	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD BKIM)	1 unit			125.000.000	0	
33	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD BKOM)	4 unit			125.000.000	0	
34	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	56 unit			69.180.000	9.872.280	14,27%
35	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (UPTD BKOM)	14 Unit			7.560.000	0	
Peningkatan Pelayanan BLUD					21.443.174.032	7.706.295.720	35,93%

36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD BKIM)	1 Unit Kerja			5.047.794.910	2.437.958.627	48,30%
37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD BKOM)	1 Unit Kerja			2.006.307.657	79.489.020	3,96%
38	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (UPTD LABKES)	1 Unit Kerja			6.592.821.465	2.605.621.868	39,52%
39	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (UPTD RS PARU)	1 Unit Kerja			7.796.250.000	2.583.326.205	33,14%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						119.354.230.207	
Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi					12.473.180.777	578.951.706	4,64%
40	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	3 Kabupaten Layanan			9.000.0000	0	
41	Pengadaan dan pemeliharaan Alat kalibrasi (UPTD BKOM)	15 Unit			22.500.000	0	

42	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4 unit			35.015.440	0	
43	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPTD. RS PARU)	23 unit			4.927.128.027	0	
44	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	19 Dokumen			59.671.805	11.302.000	18,94%
45	Pengembangan Rumah Sakit (UPTD RS PARU)	1 unit			861.592.000	0	
46	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan	2 Paket			4.889.623.218	0	
47	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya (RS Paru)	4 paket			1.315.026.000	527.411.750	40,11%

48	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya (BKIM)	1 paket			40,256,814	40.237.956	99,95%
49	Pengadaan Alat kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPTD LABKES)	3 Unit			100.509.748	0	
50	Pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan (UPTD LABKES)	28 unit			212.857.725	0	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					106.702.738.765	8.492.372.084	7,95%
51	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	66.616 orang			56.263.000	0	
52	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	332.620 orang			17.846.900	0	

53	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	7 Dokumen			488.154.000	0	
54	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	2 Dokumen			10.776.000	0	
55	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	1 Dokumen			13.380.000	0	
56	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	40 Dokumen			123.922.000	0	
57	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Dokumen			8.127.000	0	
58	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (UPTD. BKOM)	1 Dokumen			23.001.000	0	
59	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	3 Dokumen			24.681.000	2.250.000	9,12%
60	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen			8.250.000	0	
61	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan	2 Dokumen			18.192.000	0	

	mandiri dan tradisional lainnya						
62	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	5 dokumen			278.880.986	1.140.000	0,41%
63	Pengelolaan pelayanan kesehatan haji	1 dokumen			960.000	0	
64	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3 Dokumen			77.935.000	0	
65	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan Napza	10 orang			146.000.000	26.797.834	18,35%
66	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	2 dokumen			102.654.620.129	7.625.246.850	7,43%
67	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen			186.158.000	4.771.000	2,56%
68	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten / Kota	1 Dokumen			4.670.000	0	

69	Pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	52 dokumen			1.713.159.500	604.585.000	35,29%
70	Pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan (UPTD BKIM)	20 dokumen			9.188.250	4.540.000	49,41%
71	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen			2.880.000	0	
72	Investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota	2 Dokumen			36.765.000	0	
73	Pengambilan dan pengiriman Spesimen penyakit potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	400 Paket			39.895.000	3.641.400	9,20%
74	Upaya pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen			32.895.000	0	
75	Pengelolaan pelayanan kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	3.500 Keluarga			22.814.000	0	

76	Operasional pelayanan rumah sakit (uptd rs paru)	12 dokumen			703.650.000	219.400.000	31,18%
Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi					20.501.900	750.000	3,66%
77	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Dokumen			20.501.900	750.000	3,66%
Penerbitan izin rumah sakit kelas b dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi					157.808.765	31.690.500	20,08%
78	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	5 Unit			18.460.000	0	
79	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	44 unit			5.488.000	0	
80	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan (UPTD LABORATORIUM KESEHATAN)	4 unit			133.860.765	31.690.500	23,67%
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan						585.739.700	
Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk ukm dan ukp provinsi					7.330.000	0	

81	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	580 orang			7.330.000	0	
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi					578.409.700	0	
82	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	580 orang			553.468.000	0	
83	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (UPTD BKOM)	30 Orang			24.941.700	0	
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						658.771.000	
Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi					427.360.000	0	
	Peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	7 Dokumen			427.360.000	0	
Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (kie) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah					58.269.000	0	

provinsi							
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen			58.269.000	0	
Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (ukbm) tingkat daerah provinsi					173.142.000	0	
	Bimbingan teknis dan supervisi ukbm	1 Dokumen			173.142.000	0	

No.	UPTD	Anggaran	Realisasi s.d. Juni 2025	% Realisasi Anggaran
1	RS PARU	15.693.597.627	3.390.458.877	21,60
2	BKOM	3.334.341.544,94	448.320.505	13,45
3	BKIM	5.265.229.974	2.503.743.683	47,55
4	LABKES	7.090.049.703	2.637.312.368	37,20
Total		31.383.218.849	8.979.835.433	28,61

Untuk realisasi pendapatan sebagai berikut:

Pendapatan 4 UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 target Pendapatan Rp. **21.443.174.032,-** realisasi Rp. **7.706.395.720,-**

**Realisasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Keadaan Triwulan II**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2024	Target Kinerja 2025	Realisasi s.d. Maret 2025	% Capaian sd Maret 2025
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	100	100	100	100
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100	100	100	100
		Rasio daya tampung RS rujukan (Standar 1:1000)	1:708	1:704	1:704	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes	64,75	84	14,9 (target Tw I : 21)	71
		Presentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	9,9	8,5	9,72	114
		Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat)	96,25	95	97,30	102
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 0-11 Bulan	88,02	90	88,02 (target Tw I : 21)	419
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100
4	Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	95,28	94,07	95,28	101

Dengan demikian total realisasi anggaran kesehatan (Belanja operasi, belanja modal dan Belanja barang dan jasa) adalah:

Realisasi Fisik : 27,03 %

Realisasi Keuangan : 24,01 %

Urusan Kesehatan pada Tahun anggaran 2025 untuk Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui 5 Program, 17 kegiatan dan 73 sub kegiatan, untuk UPTD Laboratorium Kesehatan 2 Program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, untuk UPTD BKOM & Pelkes 2 Program, 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan, untuk UPTD BKIM 2 Program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan, untuk UPTD RS Paru 2 Program, 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan Untuk mendukung urusan wajib Dinas Kesehatan Tahun 2025 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 217.300.900.245,94 dan realisasi Rp. 52.173.449.886,- (24,01%).

Pendapatan 4 UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 target Pendapatan Rp. **21.443.174.032,-** dan terealisasi Rp. **7.706.395.720,-** (35,94 %), dengan rincian target dan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 2. 2.

Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Triwulan II Tahun 2025

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	UPTD RS PARU	7.796.250.000	2.583.326.205	33,14
2	UPTD BKOM	2.006.307.657	79.489.020	3,96
3	UPTD BKIM	5.047.794.910	2.437.958.627	48,30
4	UPTD LABKES	6.592.821.465	2.605.621.868	39,52
JUMLAH		21.443.174.032	7.706.395.720	35,94

a. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Kinerja Program Kegiatan

1. Semua kegiatan yang tertuang di DPA APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 terlaksana sesuai dengan POA (Plan Of Action) dan aliran kas pada DPA APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025
2. Efisiensi Anggaran dilakukan untuk kegiatan yang sasarannya sama akan tetapi ada di seksi/subag yang berbeda
3. Kegiatan penggerakan masyarakat memerlukan dukungan dan kehadiran stakeholders dan lintas sektor terkait sehingga harus ada penyesuaian jadwal antara stakeholders dan lintas sektor
4. Secara umum semua program dan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I telah dapat terlaksana dengan baik, rata-rata pencapaian realisasi fisik 27,03 %, dan realisasi keuangan 24,01 %.

Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Memperhatikan data di atas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan adalah antara lain adalah :

- a. Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di kabupaten/kota. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya persentase masyarakat yang melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan, pelaksanaan SPM di kabupaten/kota pun terus mengalami kenaikan artinya walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran kab/kota tetap melaksanakan pelayanan SPM di puskesmas, peningkatan persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan

menuju UHC, penurunan rasio kematian bayi. Namun demikian, yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana meningkatkan status akreditasi fasilitas Kesehatan di Sumatera Barat karena kualitas pelayanan harus tetap dipertahankan baik bahkan harus lebih baik lagi.

b. Meningkatnya ketersediaan farmasi, alat Kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ketersediaan obat esensial di puskesmas, jumlah sarana dan prasarana seperti alat kesehatan, alat kedokteran yang semakin meningkat di fasilitas kesehatan baik kab/kota maupun Rumah Sakit Provinsi.

c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di atas antara lain:

a. Kebijakan perencanaan dan penganggaran selain fokus pada pelaksanaan SPM baik SPM provinsi maupun kab/kota dan dukungan kegiatan terhadap ketercapaian IKU Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Barat.

b. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran bersumber dana lain seperti APBN, DBHCHT, CSR, dan lainnya untuk mendukung kegiatan yang belum terbiayai APBD.

c. Perlu penyesuaian kegiatan, sub kegiatan dan indikatornya sesuai evaluasi terhadap faktor penyebab kegagalan pencapaian target.

d. Perlu melihat praktik baik dari kegiatan yang telah berhasil mencapai target yang baik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dengan Capaian sd Triwulan II tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	1. Pembinaan Pelayanan Upaya Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	1. Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100 pada Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 100% 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan (standar 1: 1000). (Target Kinerja 1:704 dengan realisasi 1: 704 pada

		Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 100%
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1. Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	3. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100 pada Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 100%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / Berpotensi Bencana pada tahap pra bencana 2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	4. Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana. (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100 pada Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 100%

Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan kesehatan Ibu dan anak 2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan	5. Persentase persalinan sesuai standar di fasyankes (Target Kinerja 21 dengan realisasi 14,9 pada Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 71%
	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	4. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat	
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4. Advokasi,		

		Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
		Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	1. Pengelolaan kesehatan usia produktif 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang	6. Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) (Target Kinerja 8,5 dengan realisasi 9,72 pada Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 114%

	Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Teknis Sumber Daya 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAK 4. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	7. Akses keluarga dengan sanitasi dasar (Jamban sehat) (Target

	Upaya Kesehatan masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan,	Kinerja 95 dengan realisasi 97,30 pada Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 102%
		2. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	

Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	1. Investigasi lanjutan ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kab/kota	8. Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 - 23 bulan (Target Kinerja 21 dengan realisasi 88,02 pada Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 419%
	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	2. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		4. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,	

		PAK) 4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa (KLB	9. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko
		Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		pada situasi KLB Provinsi (Target Kinerja 100 dengan realisasi 100 pada Triwulan I tahun

				2024) dengan capaian kinerja 100%
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	10. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan. (Target Kinerja 94,07 dengan realisasi 95,28 pada Triwulan I tahun 2025) dengan capaian kinerja 101%.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja dalam Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan untuk APBD Perubahan tahun 2025 yang mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD 2021-2026 tahun keempat yang sudah ditetapkan. Usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Renja Perubahan tahun 2025 dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Dinas Kesehatan (BKIM, Labkes, Bapelkes dan RS Paru Lubuk Alung).

3.2. Pendanaan

Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif untuk usulan kegiatan perubahan APBD di tahun 2025 adalah dari pagu efisiensi sebesar Rp. **217.300.900.245,94,-** menjadi usulan perubahan sebesar Rp. **231.011.641.963.** usulan pada perubahan bertambah anggaran sebesar Rp. **13.710.741.717.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 diurutkan berdasarkan skala prioritas dan kegiatan yang mendesak serta tetap mengacu pada pencapaian indikator yang akan dicapai pada tahun 2025. Rincian rencana program dan kegiatan Perubahan APBD tahun 2025 terdapat pada tabel berikut:

Tabel T-C 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Puskesmas yang terakreditasi			97,8	98,2	98,5	98,9	100	97,8	99,64	100	100	
3	Rasio daya tampung RS rujukan (Standar 1:1000)		V	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875	1:727	1:709	1:708	1:704	
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes			78,5	80	82	84	86	75,33	73,6	84,75	84	
6	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)			13	11,5	10	8,5	7	9,3	10,4	9,9	8,5	
7	Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat)			86	89	92	95	100	85,19	89,22	96,25	95	
8	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan			75	80	85	90	95	87,71	87,76	88,02	90	
9	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan			86,1	88,2	90,3	92,4	95	86,18	92,53	95,28	94,07	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Pagu Efisiensi (Rp)	Pagu Usulan Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
DINAS KESEHATAN									
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		185.917.681.397	197.593.359.394	11.675.677.997
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		73.693.452.519	76.152.580.956	2.459.128.437
1	02	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		146.875.000	146.875.000	-
1	02	01	1,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.779.000	140.779.000	-
1	02	01	1,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.096.000	6.096.000	-
1	02	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		68.975.658.795	71.099.300.578	2.123.641.783
1	02	01	1,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	68.531.678.795	70.421.960.578	1.890.281.783

1	02	01	1,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	442.960.000	676.320.000	233.360.000
1	02	01	1,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.020.000	1.020.000	-
1	02	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		203.297.000	191.297.000	(12.000.000)
1	02	01	1,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	194.900.000	182.900.000	(12.000.000)
1	02	01	1,03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	442.000	442.000	-
1	02	01	1,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.955.000	7.955.000	-
1	02	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.507.802.174	1.578.107.974	67.304.900
1	02	01	1,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.530.500	7.530.500	-
1	02	01	1,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
1	02	01	1,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.106.971	154.631.271	30.524.300
1	02	01	1,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.897.700	111.034.700	(15.863.000)

1	02	01	1,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.280.000	4.820.000	(9.460.000)
1	02	01	1,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.234.987.003	1.297.090.603	62.103.600
1	02	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		240.000	240.000	-
1	02	01	1,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240.000	240.000	-
1	02	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.522.411.550	3.139.761.304	617.349.754
1	02	01	1,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	660.552.494	660.552.494	-
1	02	01	1,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.861.859.056	1.772.382.474	(89.476.582)
1	02	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		337.168.000	337.168.000	-
1	02	01	1,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.200.000	215.690.336	32.490.336
1	02	01	1,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.920.000	34.920.000	-
1	02	01	1,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.868.000	49.868.000	-

1	02	01	1,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.180.000	69.180.000	-
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		111.004.659.878	120.233.819.438	9.229.159.560
1	02	02	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4.993.310.463	4.958.295.023	(35.015.440)
1	02	02	1,01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.000.000	9.000.000	-
1	02	02	1,01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.015.440	-	(35.015.440)
1	02	02	1,01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
1	02	02	1,01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	59.671.805	59.671.805	-
1	02	02	1,01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	4.889.623.218	4.889.623.218	-
1	02	02	1,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		105.966.899.515	115.231.074.515	9.264.175.000

1	02	02	1,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.263.000	56.263.000	-
1	02	02	1,02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.846.900	17.846.900	-
1	02	02	1,02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	488.154.000	488.154.000	-
1	02	02	1,02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.776.000	10.776.000	-
1	02	02	1,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.380.000	13.380.000	-
1	02	02	1,02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.922.000	123.895.000	(27.000)
1	02	02	1,02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.127.000	8.127.000	-
1	02	02	1,02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.681.000	8.200.000	(16.481.000)

1	02	02	1,02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.250.000	8.250.000	-
1	02	02	1,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.192.000	17.728.000	[464.000]
1	02	02	1,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	278.880.986	278.880.986	-
1	02	02	1,02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	960.000	960.000	-
1	02	02	1,02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	77.935.000	77.935.000	-
1	02	02	1,02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.000.000	146.000.000	-

1	02	02	1,02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pajak Rokok - Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	102.654.620.129	111.946.437.129	9.291.817.000
1	02	02	1,02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	186.158.000	186.158.000	-
1	02	02	1,02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SP4 Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.670.000	4.670.000	-
1	02	02	1,02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	1.713.159.500	1.702.489.500	(10.670.000)
1	02	02	1,02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.880.000	2.880.000	-
1	02	02	1,02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Outan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.765.000	36.765.000	-

1	02	02	1,02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	39.570.000	39.570.000	-
1	02	02	1,02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.895.000	32.895.000	-
1	02	02	1,02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.814.000	22.814.000	-
1	02	02	1,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		20.501.900	20.501.900	-
1	02	02	1,03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	20.501.900	20.501.900	-
1	02	02	1,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		23.948.000	23.948.000	-
1	02	02	1,04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.460.000	18.460.000	-
1	02	02	1,04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.488.000	5.488.000	-
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		560.798.000	560.798.000	-
1	02	03	1,01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		7.330.000	7.330.000	-

1	02	03	1,01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.330.000	7.330.000	-
1	02	03	1,02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		553.468.000	553.468.000	-
1	02	03	1,02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	553.468.000	553.468.000	-
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		-	-	-
1	02	04	1,01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		-	-	-
1	02	04	1,01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
1	02	04	1,02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		-	-	-
1	02	04	1,02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		658.771.000	646.161.000	(12.610.000)
1	02	05	1,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		427.360.000	467.750.000	40.390.000

1	02	05	1,01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	427.360.000	467.750.000	40.390.000
1	02	05	1,02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		58.269.000	5.269.000	(53.000.000)
1	02	05	1,02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.269.000	5.269.000	(53.000.000)
1	02	05	1,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		173.142.000	173.142.000	-
1	02	05	1,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173.142.000	173.142.000	-
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		7.090.049.703	7.521.415.923	431.366.220
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6.642.821.465	7.521.415.923	878.594.458
1	02	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.000.000	50.000.000	-
1	02	01	1,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	50.000.000	-
1	02	01	1,10		Peningkatan Pelayanan BLUD		6.592.821.465	7.024.187.685	431.366.220
1	02	01	1,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Pendapatan dari BLUD	6.592.821.465	7.024.187.685	431.366.220
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		447.228.238	447.228.238	-

1	02	02	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		313.367.473	313.367.473	-
1	02	02	1,01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.509.748	100.509.748	-
1	02	02	1,01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.857.725	212.857.725	-
1	02	02	1,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		133.860.765	133.860.765	-
1	02	02	1,04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.860.765	133.860.765	-
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3.334.341.545	3.498.758.574	164.417.029
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		3.263.898.845	3.428.315.874	164.417.029
1	02	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		75.733.000	75.733.000	-
1	02	01	1,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.250.000	1.250.000	-
1	02	01	1,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.225.000	1.225.000	-
1	02	01	1,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.758.000	14.758.000	-
1	02	01	1,06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.500.000	58.500.000	-
1	02	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.031.848.188	1.196.265.217	164.417.029

1	02	01	1,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	288.479.945	380.300.000	91.820.055
1	02	01	1,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	743.368.243	815.965.217	72.596.974
1	02	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150.010.000	150.010.000	-
1	02	01	1,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.450.000	17.450.000	-
1	02	01	1,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.000.000	125.000.000	-
1	02	01	1,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.560.000	7.560.000	-
1	02	01	1,10		Peningkatan Pelayanan BLUD		2.006.307.657	2.006.307.657	-
1	02	01	1,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Pendapatan dari BLUD	2.006.307.657	2.006.307.657	-
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		45.501.000	45.501.000	-
1	02	02	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		22.500.000	22.500.000	-
1	02	02	1,01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.500.000	22.500.000	-
1	02	02	1,01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-

1	02	02	1,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		23.001.000	23.001.000	-
1	02	02	1,02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.001.000	23.001.000	-
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		24.941.700	24.941.700	-
1	02	03	1,02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		24.941.700	24.941.700	-
1	02	03	1,02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.941.700	24.941.700	-
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.265.229.974	5.265.229.974	-
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		5.215.784.910	5.215.784.910	-
1	02	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		42.990.000	42.990.000	-
1	02	01	1,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.990.000	42.990.000	-
1	02	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		125.000.000	125.000.000	-
1	02	01	1,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.000.000	125.000.000	-
1	02	01	1,10		Peningkatan Pelayanan BLUD		5.047.794.910	5.047.794.910	-
1	02	01	1,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Pendapatan dari BLUD	5.047.794.910	5.047.794.910	-

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		49.445.064	49.445.064	-
1	02	02	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		40.256.814	40.256.814	-
1	02	02	1,01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.256.814	40.256.814	-
1	02	02	1,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9.188.250	9.188.250	-
1	02	02	1,02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.188.250	9.188.250	-
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15.693.597.627	17.132.878.098	1.439.280.471
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		7.886.201.600	9.325.482.071	1.439.280.471
1	02	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		25.000.000	25.000.000	-
1	02	01	1,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000	25.000.000	-
1	02	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.801.600	43.801.600	-
1	02	01	1,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.801.600	43.801.600	-

1	02	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		21.150.000	21.150.000	-
1	02	01	1,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.150.000	21.150.000	-
1	02	01	1,10		Peningkatan Pelayanan BLUD		7.796.250.000	9.235.530.471	1.439.280.471
1	02	01	1,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Pendapatan dari BLUD	7.796.250.000	9.235.530.471	1.439.280.471
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		7.807.396.027	7.807.396.027	-
1	02	02	1,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7.103.746.027	7.103.746.027	-
1	02	02	1,01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Pelayan n Kesehatan Rujukan	4.927.128.027	4.927.128.027	-
1	02	02	1,01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Pelayan n Kesehatan Rujukan	861.592.000	861.592.000	-
1	02	02	1,01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.315.026.000	1.315.026.000	-
1	02	02	1,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		703.650.000	703.650.000	-
1	02	02	1,02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	703.650.000	703.650.000	-
TOTAL							217.300.900.246	231.011.641.963	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2025. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa 2 (dua) dokumen Perencanaan OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yakni Renstra OPD berupa Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun dan dokumen Renja berupa dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan.

Rancangan Renja OPD secara simultan juga akan menjadi bagian rancangan RKPD dan akan ditetapkan juga menjadi bahan penyusunan KUPA PPAS dan juga RAPBDP. Dengan ketersediaan dana, maka program dan kegiatan yang diusulkan merupakan prioritas dan mendesak untuk pencapaian target indikator kinerja bidang kesehatan.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perubahan OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Renstra OPD tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya Renja Perubahan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini akan disesuaikan dengan RKPD yang ditetapkan untuk kemudian menjadi bahan penyusunan KUPA-PPAS dan APBD.

Keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan tersebut sangat tergantung pada komitmen serta kesungguhan para penyelenggaranya dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan kesehatan.

Padang, Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat



dr. Lila Yanwar, MARS

NIP. 19720330 200212 2 001